****

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK-BLU) PADA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) TEGAL**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

**Rizqa Nursa Nailurakhma**

**NPM: 4322600101**

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**





**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari, dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya.

–Ali bin Abi Thalib-

Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu! Dan karena itulah, qalbu seorang pecinta-Nya lebih besar daripada Singgasana-Nya.

-Jalaludin Rumi-

Persembahan:

Untuk Sang Raja Terhebat yang Sedang Berjuang

Putri Lincah yang Penuh Imajinasi

Pangeran Pelindung yang Pandai Berceloteh



***ABSTRACT***

**Rizqa Nursa Nailurakhma, 2024, *Financial Performance Analysis Before and After the Implementation of Public Service Agency Financial Management at the Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal.***

*This study aims to determine the difference in financial performance of the Fisheries Training and Extension Center (BPPP) Tegal before and after the implementation of Public Service Agency Financial Management (PK-BLU) using financial ratio indicators based on PER-21/PB/2015, Value For Money (VFM), and Balanced Scorecard (BSC). This research is a comparative study with a quantitative approach. The data in this study uses secondary data obtained from the Annual Financial Report of BPPP Tegal and BPPP Tegal Performance Report before PK-BLU in 2020-2021 and after PK-BLU in 2022-2023. The data analysis method uses the Wilcoxon Signed Rank Test with a significance level (alpha) of 0.05.*

*The test results indicate that there is a difference in financial performance using the PER-21/PB/2015 approach with a significance value of (0.001) ≤ α (0.05), no difference in financial performance using the Value For Money (VFM) approach with a significance value of (0.674)>α (0.05), and no difference in financial performance using the Balanced Scorecard (BSC) approach with a significance value of (0.833) > α (0.05).*

*Overall, this study shows that the financial performance of BPPP Tegal has improved after implementing PK-BLU. This is evidenced by the increase in financial ratios after PK-BLU, indicating better financial management.*

***Keywords:*** *Financial Performance, Financial Ratios, Public Service Agency*

**ABSTRAK**

**Rizqa Nursa Nailurakhma, 2024, Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara kinerja keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebelum dan sesudah penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dengan menggunakan pendekatan indikator rasio keuangan sesuai dengan PER-21/PB/2015, *Value For Money* (VFM) dan *Balanced Scorecard* (BSC). Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan BPPP Tegal dan Laporan Kinerja BPPP Tegal sebelum PK-BLU pada tahun 2020-2021 dan sesudah PK-BLU pada tahun 2022-2023. Metode analisis data menggunakan Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* dengan nilai signifikansi (alpha) 0,05.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan PER-21/PB/2015 dengan nilai signifikansi sebesar (0,001) ≤ α (0,05), tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan *Value For Money* (VFM) dengan nilai signifikansi sebesar (0,674) > α (0,05), dan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) dengan nilai signifikansi sebesar (0,833) > α (0,05).

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPPP Tegal mengalami peningkatan setelah menerapkan PK-BLU. Hal ini terlihat dari meningkatnya rasio keuangan sesudah PK-BLU yang dapat diartikan bahwa pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Badan Layanan Umum

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal”.**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak, CA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal dan Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.

2. Dr. Abdulloh Mubarok, S.E., M.M., Ak, CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

3. Budi Susetyo, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi peneliti.

Kami menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, makan kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, Juli 2024

 

Rizqa Nursa Nailurakhma

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

[HALAMAN JUDUL](#_Toc144639096) i

[HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc144639097)

[HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI iii](#_Toc144639098)

[MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv](#_Toc144639096)

[HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v](#_Toc144639096)

[ABSTRACT v](#_Toc144639096)i

[ABSTRAK v](#_Toc144639096)ii

[KATA PENGANTAR v](#_Toc144639096)iii

[DAFTAR ISI](#_Toc144639097) ix

[DAFTAR TABEL x](#_Toc144639098)i

[DAFTAR GAMBAR xi](#_Toc144639097)ii

[DAFTAR LAMPIRAN xiv](#_Toc144639097)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc144639098)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc144639099)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc144639100)

[C. Tujuan Penelitian 6](#_Toc144639101)

[D. Manfaat Penelitian 7](#_Toc144639102)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8](#_Toc144639098)

[A. Landasan Teori 8](#_Toc144639099)

[B. Penelitian Terdahulu 34](#_Toc144639100)

[C. Kerangka Pemikiran Konseptual 45](#_Toc144639101)

[BAB III METODE PENELITIAN 47](#_Toc144639098)

[A. Jenis Penelitian 47](#_Toc144639099)

[B. Subyek Penelitian](#_Toc144639100) 47

[C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel 48](#_Toc144639102)

[D. Metode Pengumpulan Data 50](#_Toc144639102)

[E. Metode Analisis Data 50](#_Toc144639101)

[BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52](#_Toc144639098)

[A. Gambaran Umum 52](#_Toc144639099)

[B. Hasil Penelitian](#_Toc144639100) 55

[C. Pembahasan 79](#_Toc144639102)

[BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 90](#_Toc144639098)

[A. Kesimpulan 91](#_Toc144639099)

[B. Saran](#_Toc144639100) 93

[DAFTAR PUSTAKA](#_Toc144639097) 95

[LAMPIRAN](#_Toc144639097) 98

**DAFTAR TABEL**

**Tabel Halaman**

Tabel 2.1 [Penelitian Terdahulu . 38](#_Toc144639096)

Tabel 3.1 [Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel. 48](#_Toc144639096)

Tabel 4.1 [Jumlah Pegawai BPPP Tegal berdasarkan Jabatan. 55](#_Toc144639096)

Tabel 4.2 [Hasil Perhitungan Rasio PER-21/PB/2015 Sebelum Penerapan PK-BLU Tahun 2020. 56](#_Toc144639096)

Tabel 4.3 [Hasil Perhitungan Rasio PER-21/PB/2015 SebelumPenerapan PK-BLU Tahun 2021. 57](#_Toc144639096)

Tabel 4.4 [Hasil Perhitungan Rasio PER-21/PB/2015 Sesudah Penerapan PK-BLU Tahun 2022 59](#_Toc144639096)

Tabel 4.5 [Hasil Perhitungan Rasio PER-21/PB/2015 Sesudah Penerapan PK-BLU Tahun 2023 60](#_Toc144639096)

Tabel 4.6 [Hasil Perbandingan Rasio PER-21/PB/2015 Sebelum dan Sesudah Penerapan PK-BLU 61](#_Toc144639096)

Tabel 4.7 [Hasil Perhitungan Rasio *Value For Money (VFM)* Sebelum Penerapan PK-BLU Tahun 2020 64](#_Toc144639096)

Tabel 4.8 [Hasil Perhitungan Rasio *Value For Money (VFM)* Sebelum Penerapan PK-BLU Tahun 2021 65](#_Toc144639096)

Tabel 4.9 [Hasil Perhitungan Rasio *Value For Money (VFM)* Sesudah Penerapan PK-BLU Tahun 2022 65](#_Toc144639096)

Tabel 4.10 [Hasil Perhitungan Rasio *Value For Money (VFM)*  Sesudah Penerapan PK-BLU Tahun 2023 66](#_Toc144639096)

Tabel 4.11 [Hasil Perbandingan Rasio *Value For Money (VFM)* Sebelum dan Sesudah Penerapan PK-BLU 67](#_Toc144639096)

Tabel 4.12 [Hasil Perhitungan Rasio *Balance Scorecard (BSC)* Sebelum Penerapan PK-BLU Tahun 2020 68](#_Toc144639096)

Tabel 4.13 [Hasil Perhitungan Rasio *Balance Scorecard (BSC)* Sebelum Penerapan PK-BLU Tahun 2021 69](#_Toc144639096)

Tabel 4.14 [Hasil Perhitungan Rasio *Balance Scorecard (BSC)*  Sesudah Penerapan PK-BLU Tahun 2022 70](#_Toc144639096)

Tabel 4.15 [Hasil Perhitungan Rasio *Balance Scorecard (BSC)*  Sesudah Penerapan PK-BLU Tahun 2023 70](#_Toc144639096)

Tabel 4.16 [Hasil Perbandingan Rasio *Balance Scorecard (BSC)* Sebelum dan Sesudah Penerapan PK-BLU 71](#_Toc144639096)

Tabel 4.17 [Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PK-BLU berdasarkan PER-21/PB/2015 74](#_Toc144639096)

Tabel 4.18 [Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PK-BLU berdasarkan Value For Money (VFM) 76](#_Toc144639096)

Tabel 4.19 [Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PK-BLU berdasarkan Balance Scorecard (BSC) 78](#_Toc144639096)

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar Halaman**

Gambar 2.1 [Skema *Value For Money* (VFM) 2](#_Toc144639096)9

Gambar 2.2 [Model Kerangka Pemikiran](#_Toc144639096) 45

Gambar 4.1 [Struktur Organisasi BPPP Tegal](#_Toc144639096) 54

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Laporan Keuangan BPPP Tegal TA. 2020-2023 (Ringkasan)

Lampiran 2. Laporan Kinerja BPPP Tegal TA. 2020-2023 (Ikhtisar)

Lampiran 3. Data Input SPSS

Lampiran 4. Hasil Output SPSS Uji *Wilcoxon Signed Rank Test*

Lampiran 5. Lembar Kartu Konsultasi

**BAB I**

 **PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Perekonomian suatu negara pada dasarnya terdiri dari pihak pemerintah dan pihak swasta. Keduanya memiliki peranan penting dan berkontribusi untuk menunjang perekonomian meskipun memiliki tujuan yang berbeda. Dilihat dari sisi pemerintah, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas sesuai dengan fungsinya untuk mengatur, mengarahkan, mengawasi serta menjadi tokoh dalam perekonomian negara. Sementara di pihak swasta, fokus mereka adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin dari berbagai bentuk barang dan jasa. Di sisi lain, swasta juga membantu masyarakat seperti menyerap tenaga kerja, memberikan peningkatan daya beli dan kreatifitas masyarakat, hingga menambah pemasukan negara. Namun demikian, kendali penuh dalam perekonomian negara tetap berada di tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara dalam bentuk perusahaan pemerintah dan organisasi sektor publik. (Gade, 2002)

Organisasi sektor publik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik memiliki tanggungjawab penuh kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan untuk memberikan pelayanannya berasal dari masyarakat. Dalam suatu pemerintahan dimungkinkan terdiri dari berbagai macam organisasi sektor publik yang pendirian dan fungsinya memiliki misi tersendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya adalah instansi pemerintah dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Dengan kata lain tujuan utama pembentukan BLU adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. BLU diharapkan menjadi implementasi konkrit dari sistem penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja.

Penilaian kinerja keuangan pada instansi pemerintah dengan pola pengelolaan keuangan BLU dapat dilakukan pengukuran melalui berbagai pendekatan diantaranya berdasarkan indikator rasio keuangam sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor. PER-21/PB/2015, *Value For Money* (VFM) dan *Balanced Scorecard* (BSC). Keseluruhan pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dalam pengelolaan keuangan publik telah dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tujuan organisasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahromi & Cheisviyanny, (2023) menunjukkan bahwa kinerja keuangan Universitas Negeri Padang dilihat dari perhitungan rasio keuangan setelah diterapkannya PK-BLU ini semakin membaik dari tahun ke tahunnya meskipun dari sisi rasionya masih belum stabil, sedangkan untuk tingkat kepuasan masyarakat (mahasiswa) setelah diterapkannya PK-BLU di Universitas Negeri Padang masuk dalam kategori baik. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Winarso, (2018) dalam mengukur kinerja keuangan di RSUD Idaman Banjarbaru. Hasil penelitian dengan perhitungan rasio menunjukkan hasil kinerja keuangan yang fluktuatif meskipun cenderung hampir sama selama tahun 2013-2016 dan nilai kinerja keuangan memperoleh kriteria Baik.

Penelitian yang serupa dilakukan Nurliah et al. (2020) untuk menganalisis kinerja keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar setelah implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) selama tahun 2015-2018. Hasil penelitian berdasarkan analisis rasio menunjukkan bahwa nilai penilaian kinerja keuangan digolongkan dalam klasifikasi cukup sehat. Namun berbeda dengan hasil penelitian Sulastiningsih et al. (2022) dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang sama pada BLUD Puskesmas Kejajar 1 Wonosobo dimana menunjukkan kinerja keuangan tergolong dalam kriteria sedang dengan predikat BBB.

Maharani et al., (2003) menganalisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PK-BLU di Universitas Sebelas Maret tahun 2006-2008 dan tahun 2009-2011 dengan menggunakan *paired sample t-test*. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Penelitian mengenai evaluasi kinerja keuangan dan pelayanan pada BLU juga telah dilakukan oleh Efrina S. et al. (2019) pada Universitas Jambi dengan menggunakan pendekatan studi kasus berbasis paradigma interpretatif dengan mengaplikasikan *institutional work theory*. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan hingga saat ini dinyatakan sudah cukup baik dan telah mencapai target yang diinginkan.

Lidyawati (2019) melakukan analisis layanan keuangan dalam penilaian kinerja keuangan BLUD kota Bekasi tahun 2014, dengan menggunakan analisa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efesiensi. Hasil dari penelitian ini adalah BLUD kota Bekasi tahun 2014 tergolong mandiri, baik dan efektif dan efisien. Penelitian yang sama dengan menggunakan pendekatan *Value For Money* (VFM) dilakukan oleh Sampow & Pangkey, (2022) mengenai kinerja keuangan BKAD Kota Bitung tahun 2016-2019 yang menunjukkan hasil cukup ekonomi, kurang efisiensi dan efektif.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) dilakukan oleh Rasidi & Sadmoko (2019) mengenai kinerja IPDN Kampus Jatinangor dari tahun 2010 hingga 2017. Hasil penelitian menunjukkan pencapaian yang baik dalam keempat perspektif BSC. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2022) tentang perbandingan kinerja keuangan dan pelayanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang pada periode 2019-2020, dengan menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan dan pelayanan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PB-32/2014 dan *Maturity Rating* BLU, menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 belum signifikan terhadap kinerja badan layanan publik.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal merupakan satuan kerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan utama berupa peningkatan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

BPPP Tegal secara resmi ditetapkan menjadi institusi Badan Layanan Umum melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 526/KMK.05/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo, pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Sejak ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum, BPPP Tegal telah melakukan berbagai pengembangan layanan. Penerimaan PNBP BLU akan dialokasikan pada peningkatan layanan BPPP Tegal seperti peningkatan sarana pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, dan operasional kegiatan lainnya.

Penerapan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) di BPPP Tegal masih tergolong baru dan sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Untuk itu penulis ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan dilihat dari kinerja keuangan BPPP Tegal sebelum dan sesudah diberlakukannya PK-BLU dengan menggunakan pendekatan kinerja keuangan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menganalisis tentang kinerja keuangan terhadap laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di BPPP Tegal.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis ingin mengetahui bahwa:

1. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebelum dan sesudah penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dengan menggunakan pendekatan Indikator rasio keuangan sesuai dengan PER-21/PB/2015, *Value For Money* (VFM) dan *Balanced Scorecard* (BSC)?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) sesudah penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)?
3. **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara kinerja keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal sebelum dan sesudah penerapan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dengan menggunakan pendekatan Indikator rasio keuangan sesuai dengan PER-21/PB/2015, *Value For Money* (VFM) dan *Balanced Scorecard* (BSC).
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) sesudah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
3. **Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis yaitu:

Bagi Satker PK-BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal untuk dapat dijadikan sebagai masukan atau rekomendasi yang berguna bagi peningkatan kinerja keuangan.

1. Manfaat teoritis yaitu:
2. Sebagai bahan referensi atau literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai kinerja keuangan dalam PK-BLU.
3. Sebagai wacana khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang kinerja keuangan dalam PK-BLU.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. Teori Agensifikasi

Teori keagenan (*agency theory*) menggambarkan hubungan antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak yang ditunjuk sebagai induk atau atasan (*principal*) melibatkan pihak lain yang ditunjuk sebagai agen untuk melakukan beberapa tugas dari induknya. (Kivisto dalam Safitri, 2022)

Teori agensifikasi semakin banyak diaplikasikan akibat dampak dari gelombang reformasi *New Public Management* (NPM). Reformasi NPM menjadi berkembang diseluruh dunia karena banyaknya lembaga sektor publik yang menerapkan anggaran berbasis kinerja, desentralisasi, manajemen berbasis *outcome*, mekanisme penggunaan kontrak kinerja dan spesifikasi kinerja yang lebih ketat. Praktik manajemen pada sektor swasta dianggap lebih baik daripada sektor publik sehingga sektor publik perlu untuk mengadopsi sistem manajemen sektor swasta untuk semakin meningkatkan kinerjanya. (Prabowo, 2020)

Dasar dari prinsip agensifikasi adalah perbedaan antara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan (politik dan administrasi). Dalam hal ini pengertian agensi dalam konteks agensifikasi merupakan organisasi yang secara struktural dipisahkan dari pemerintah dan beroperasi di bawah kondisi yang lebih bersifat bisnis daripada birokrasi pemerintah. Agensi dibentuk dengan memiliki sistem pengelolaan keuangan dan kebijakan organisasi yang berbeda dari pemerintah. Di Indonesia, agensi disebut dengan Badan Layanan Umum (BLU) yang memberikan layanan publik kepada masyarakat umum. (Thiel dalam Safitri, 2022)

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Domain publik salah satunya meliputi badan-badan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah) dimana terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik terhadap praktik akuntansi di dalamnya.

Tujuan akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo, (2006) menyatakan bahwa:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja. (Mardiasmo, 2006:14)

1. Badan Layanan Umum (BLU)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengungkapkan bahwa definisi Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. PPK-BLU menitikberatkan pada fleksibilitas keuangan dan anggaran dimulai dari perencanaan dan anggaran BLU, pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi hingga pengelolaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Terdapat lima karakteristik khusus yang membedakan Badan Layanan Umum dengan organisasi ataupun instansi pemerintah lainnya dilihat dari definisi BLU, yakni:

1. BLU adalah instansi pemerintah yang memberikan layanan penyediaan barang dan jasa. Ini adalah karakter utama dari Badan Layanan Umum.
2. BLU harus menjalankan praktik bisnis yang sehat tanpa menerapkan pencarian keuntungan.
3. BLU dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas.
4. Adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU.
5. BLU dikecualikan dari ketentuan keuangan negara pada umumnya.

Tujuan utama pembentukan BLU dapat disimpulkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini mengarahkan satker pada instansi pemerintah untuk dapat mengelola keuangan secara fleksibel dan menerapkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dalam setiap bentuk pendayagunaan sumber daya yang dipakainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, persyaratan substantif menjadi BLU terpenuhi apabila Satker menyelenggarakan jenis pelayanan umum berupa:

1. Penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan umum yang dapat berupa bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang lainnya;
2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum yang dapat berupa badan pengusahaan kawasan, otorita, dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu; dan/atau
3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat yang dapat berupa lembaga/badan pengelolaan dana investasi, dana bergulir, dan dana abadi pendidikan.

Pelayanan umum dimaksud merupakan:

1. Pelayanan umum yang bersifat operasional (bukan sebagai regulator) sesuai dengan tugas dan fungsi Satker; dan
2. Pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan. Pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan dimaksud dibuktikan dengan dokumen rencana tarif layanan

Pejabat pengelola BLU terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU. Atas dasar ketentuan ini, maka BLU dapat merekrut pegawai sendiri yang berstatus non PNS dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelola keuangan BLU dapat membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern, berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLU, dan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, Pejabat pengelola keuangan BLU juga dapat membentuk Dewan Pengawas, yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelola keuangan BLU. Fungsi dari setiap jabatan harus dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga pelayanan lebih baik dan pengelolaan keuangan lebih profesional.

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif sebagai berikut:

1. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:
2. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
3. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
4. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
5. Persyaratan teknis terpenuhi apabila:
6. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
7. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.
8. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:
9. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
10. Pola tata kelola;
11. Rencana strategis bisnis;
12. Laporan keuangan pokok;
13. Standar pelayanan minimum; dan
14. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Status BLU secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud di atas telah dipenuhi dengan memuaskan. Instansi pemerintah yang menerapkan PK-BLU menggunakan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Berdasarkan PP 23 Tahun 2005, Tarif Layanan pada BLU harus mempertimbangkan:

1. Kontinuitas dan pengembangan layanan

Pengaruh pengenaan tarif secara keseluruhan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan satker BLU, yang dapat dilihat dari proyeksi terhadap kinerja layanan dan kinerja keuangan yang akan datang.

1. Daya beli masyarakat

Pertimbangan yang berorientasi kepada kemauan dan kemampuan daya beli masyarakat penerima layanan terhadap masing-masing tarif layanan.

1. Asas keadilan dan kepatuhan

Pengenaan tarif sesuai dengan golongan masyarakat penerima layanan dan tidak bertentangan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

1. Kompetisi yang sehat

Membandingkan tarif dengan industri sejenis dan dengan mempertimbangkan faktor lokasi dan nilai tambah yang diberikan. Tarif yang dikenakan merupakan tarif yang wajar untuk diberlakukan kepada masyarakat.

Satker BLU wajib menyusun target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BLU setelah memiliki tarif layanan BLU yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusunan target ini memperkirakan pendapatan yang akan diterima dalam 1 (satu) tahun yang akan datang dengan berkoordinasi dengan masing-masing Kementerian/Lembaga. Target PNBP BLU ini memperhitungkan seluruh potensi pendapatan yang akan diperoleh pada tahun yang berkenaan.

BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian dibuat Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLU tahunan yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLU untuk diajukan kepada Menteri Keuangan/PPKD sesuai dengan kewenangannya.Dokumen pelaksanaan anggaran BLU paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan oleh BLU. Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN/APBD oleh BLU dan menjadi lampiran dari perjanjian kinerja dengan pimpinan BLU yang bersangkutan.

Pengukuran kinerja menjadi penting dilaksanakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan seluruh komponen organisasi (input, proses, output) untuk mencapai hasil (outcomes) yang telah direncanakan , pengukuran kinerja merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian rencana kerja tahunan dengan pencapaian target kinerja indikator kinerja utama. Badan Layanan Umum diharapkan akan menjadi acuan instansi-instansi lainnya dalam menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja.

1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen bisnis yang digunaakan perusahaan untuk melaporkan hasil aktivitasnya kepada berbagai kelompok pemakai, yang dapat meliputi manajer, investor, kreditor dan agen regulator. Sebaliknya pihak – pihak tersebut menggunakan informasi yang dilakukan untuk membuat berbagai keputusan, seperti apakah akan melakukan investasi dalam atau meminjamkan uang kepada perusahaan. (Harrison et al., 2012:9)

Hery dalam Ayu et al., (2018) menyatakan bahwa Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunjukan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

Tujuan dari pelaporan keuangan melalui laporan keuangan dan pengungkapan lainnya adalah untuk membantu pemakai mengambil keputusan ekonomi. Salah satu alat yang digunakan adalah melalui analisis laporan keuangan. Di dalamnya mencakup pemeriksaan atas perubahan dari tahun ke tahun, analisis komponen dan *common-size*, serta penggunaan rasio keuangan yang umum untuk membantu mengambil keputusan ekonomi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

Mardiasmo, (2006:100) mengungkapkan secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Laporan keuangan pemerintah tidak berfokus pada organisasi secara keseluruhan, akan tetapi berfokus pada unit kerja pemerintah sebagai suatu bagian organisasi. Unit-unit kerja pemerintah tersebut merupakan entitas akuntansi dan entitas anggaran yang otonom. Laporan keuangan pemerintah lebih berorientasi pada jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pelaporan keuangan BLU dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan keuangan BLU setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan mengenai kinerja.
2. Laporan realisasi anggaran/laporan operasional disesuaikan dengan ketentuan pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLU yang bersangkutan.
3. Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan.
4. Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLU, berupa lembar laporan realisasi anggaran/operasional, lembar neraca, dan lembar laporan arus kas.
5. Laporan keuangan BLU disampaikan secara berkala kepada menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/ SKPD/pemerintah daerah.
6. Laporan keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah serta kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
7. Laporan keuangan BLU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.
8. Penggabungan laporan keuangan BLU pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
9. Laporan pertanggungjawaban keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan perlu dilakukan analisis untuk memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Dalam menganalisis laporan keuangan terdapat berbagai cara yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi.

Kashmir dalam Sulastiningsih et al., (2022) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan adalah suatu proses analisis terhadap laporan keuangan dengan tujuan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dari hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

Prastowo dalam Sulastiningsih et al., (2022) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut dan menelaah hubungan diantara unsur-unsur tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Munawir dalam Sulastiningsih et al., (2022) mengungkapkan teknik analisis laporan keuangan terdiri dari:

1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, adalah metode dan teknik analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih, dengan menunjukkan: data absolut dalam rupiah, kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, kenaikan atau penurunan dalam persentase, perbandingan dalam rasio atau persentase dalam total. Dengan metode ini dapat diketahui perubahan yang terjadi.
2. Trend atau tendensi atau posisi dan kemajuan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam persentase (*Trend Percentage Analysis*), adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau bahkan turun.
3. Laporan dengan persentase per komponen (*Common Size Statement*), adalah suatu metode analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aset terhadap total asetnya, juga untuk mengetahui struktur permodalannya dan komposisi perongkosan yang terjadi dihubungkan dengan jumlah penjualannya.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan modal kerja atau untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya modal kerja dalam periode tertentu.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (*Cash Flow Statement Analysis*), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab berubahnya jumlah uang kas atau untuk mengetahui sumber-sumber serta penggunaan uang kas selama periode tertentu.
6. Analisis Rasio adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor (*Gross Profit Analysis*), adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor suatu perusahaan dari suatu periode ke periode yang lain atau perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dibudgetkan untuk periode tersebut.

Definisi-definisi yang ada pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah kegiatan menilai informasi laporan keuangan dengan berbagai macam teknik analisis untuk mencari hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman mengenai kondisi keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut pemahaman penulis bahwa laporan keuangan adalah suatu dokumen yang menunjukkan kondisi keuangan suatu entitas sebagai bentuk penyajian informasi akurat yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara itu upaya untuk menilai dan memahami informasi dalam laporan keuangan dilakukan teknik analisis laporan keuangan.

Pentingnya dilakukan analisis laporan keuangan pemerintah untuk mengetahui kualitas kinerja organisasi pemerintah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan dana masyarakat secara tepat.

1. Pendekatan Kinerja Keuangan

Bastian dalam Syahromi & Cheisviyanny, (2023) mengungkapkan bahwa definisi sebuah kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Sementara itu kinerja keuangan adalah prestasi keuangan yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan yaitu neraca rugi-laba dan kinerja keuangan yang menggambarkan usaha perusahaan (*operation income*). (Muchlis dalam Lidyawati, 2019)

Indiany et al., (2017) juga mengungkapkan bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.

Kinerja dalam sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja secara komprehensif. Hal ini berbeda dengan sektor swasta, ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik, karena sifat output yang dihasilkan oleh sektor publik lebih banyak bersifat *intangible output*. Oleh karenanya perlu pengembangan ukuran penilaian kinerja non finansial (Mardiasmo, 2006)

Kinerja organisasi dapat diketahui dari kriteria keberhasilan suatu organisasi berupa target-target tertentu yang hendak dicapai, dimana tingkat pencapaian atas target tersebut didasarkan pada suatu konsep tertentu yang sudah teruji validitasnya dalam melakukan pengukuran kinerja suatu organisasi. Menurut Niven dalam Prabowo, (2020) menyatakan bahwa sudah saatnya penekanan dalam mengukur pengelolaan kinerja agar pemerintah dapat selalu meningkatkan hasil kerja.

Terdapat 6 (enam) konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik dan organisasi non profit, yaitu:

1. *Financial accountability* adalah Pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang telah dikeluarkan.
2. *Program* *products or output* adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik bergantung pada jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan beberapa jumlah orang yang dilayani.
3. *Adherence to standards quality in service delivery* adalah pengukuran kinerja yang terkonsentrasi pada pelayanan yang mengarah pada ketentuan badan sertifikasi dan akreditasi pemerintah. Badan tersebut juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk/jasa yang mereka berikan.
4. *Participant related measures* adalah pengukuran kinerja yang menekankan pentingnya kepastian pemberian pelayanan hanya kepada mereka yang sangat membutuhkan, oleh karena itu organisasi sektor publik akan melakukan penilaian klien atau pelanggan yang akan dilayani berdasarkan status demografinya, sehingga bisa ditentukan mana pelanggan yang layak mendapatkan pelayanan terlebih dahulu.
5. *Key performance indicators* adalah pengukuran kinerja yang berdasarkan pada pembentukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat mewakili semua area yang ingin dinilai, untuk kemudian disusun indikator-indikator yang mampu mengukur kriteria tersebut.
6. *Client satisfaction* adalah pengukuran kinerja organisasi publik didasarkan pada kepuasan pelanggan atas penyediaan barang atau pelayanan publik. Beberapa faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan yaitu: ketepatan waktu pelayanan, kemudahan untuk mendapat layanan dan kepuasan secara keseluruhan.

Kesimpulan dari definisi-definisi diatas adalah bahwa kinerja merupakan gambaran prestasi keuangan dalam suatu laporan keuangan. Namun untuk kinerja keuangan pemerintah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan laba yang diperoleh, melainkan terdapat pengukuran-pengukuran kinerja lain yang perlu diperhatikan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik menimbulkan tuntutan yang semakin tinggi terhadap pertanggungjawaban kinerja yang diberikan oleh penyelenggaran negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan sebelum dan sesudah pola pengelolaan BLU dengan perhitungan analisis rasio berdasarkan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 21/ PB/2015, *Value For Money* (VFM) dan *Balance Scorecard* (BSC).

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 21/PB/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-32/PB/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Pendidikan mengungkapkan penilaian kinerja BLU adalah suatu cara untuk menilai capaian pengadaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang mencakup dua aspek penilaian sebagai berikut:
2. Penilaian aspek keuangan dilakukan berdasarkan data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Di dalam aspek keuangan meliputi rasio keuangan dan kepatuhan pengelolaan keuangan BLU.
3. Penilaian aspek pelayanan dilakukan berdasarkan data/hasil perhitungan layanan BLU pada tahun yang akan dinilai dan disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga/pemimpin BLU kepada Menteri Keuangan. Di dalam aspek pelayanan meliputi kualitas layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat.

Penelitian ini hanya melakukan penilaian pada aspek keuangan dengan melakukan penghitungan rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, meliputi:

1. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas adalah suatu rasio untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek.

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

1. Periode Penagihan Piutang (*Collection Period*)

Periode penagihah piutang merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara piutang usaha dengan pendapatan usaha satu tahun.

1. Perputaran Aset Tetap (*Fixed Asset Turnover*)

Perputaran aset tetap merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap.

1. Imbalan atas Aset Tetap (*Return on Fixed Asset*)

Imbalan atas aset tetap merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan.

1. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Imbalan ekuitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/defisit tahun berjalan.

1. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional merupakan rasio yang digunakan untuk melihat perbandingan antara penerimaan PNBP dengan biaya operasional.

1. *Value For Money* (VFM)

Mardiasmo, (2006:4) menyatakan bahwa *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yang terdiri dari: ekonomi, efisiensi dan efektifitas

1. Ekonomi: ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi dapat meminimalisir input *resource* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi: efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas: efektifitas merupakan perbandingan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan atau perbandingan outcome dengan output.

Secara skematis, *Value For Money* dapat digambarkan sebagai berikut:

Nilai Input (Rp)

Input

Outcome

Efisiensi

Output

Efektivitas

Ekonomi

**Gambar 2.1 Skema *Value For Money* (VFM)**

 *Value For Money* (VFM) dapat dinyatakan dalam suatu kriteria tertentu berdasarkan hasil perhitungan nilai persentase yang diperoleh. Hal tersebut diperlukan untuk menilai seberapa baik pemerintah atau lembaga publik mengelola anggarannya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. **Persentase hasil rasio VFM** merupakan perhitungan persentase yang menunjukkan kinerja dalam tiga komponen utama VFM berupa rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas yaitu sebagai berikut:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Hasil % | Kriteria Ekonomi | Kriteria Efisiensi | Kriteria Efektivitas |
| 1 | >100% | Sangat Ekonomis | Tidak Efisien | Sangat Efektif |
| 2 | 90%-100% | Ekonomis | Kurang Efisien | Efektif |
| 3 | 80%-90% | Cukup Ekonomis | Cukup Efisien | Cukup Efektif |
| 4 | 60%-80% | Kurang Ekonomis | Efisien | Kurang Efektif |
| 5 | <60% | Tidak Ekonomis | Sangat Efisien | Tidak Efektif |

**Tabel 2.1 Persentase Hasil Rasio *Value For Money* (VFM)**

 Sumber: Mahmudi dalam (Sampow & Pangkey, 2022)

Secara keseluruhan, persentase hasil rasio VFM memberikan gambaran yang komprehensif tentang seberapa baik pemerintah atau lembaga publik mengelola sumber daya mereka untuk memberikan layanan yang hemat, efisien, dan efektif kepada masyarakat

1. *Balanced Scorecard* (BSC)

Balanced Scorecard merupakan hasil penelitian dari Nolan Norton & Robert Kaplan pada Tahun 1990. Menurut Niven dalam Prabowo, (2020), *Balanced Scorecard* adalah sekumpulan ukuran-ukuran kuantitatif yang dipilih secara selektif yang diturunkan dari strategi organisasi. Ukuran – ukuran yang dipilih tersebut merupakan alat bagi para pemimpin untuk mengkomunikasikan kepada para pegawai dan stakeholder luar mengenai outcome dan pendorong kinerja yang dengannya organisasi akan mencapai misi dan sasaran strategisnya.

*Balanced Scorecard* adalah suatu pendekatan untuk mengukur kinerja yang akan menilai kinerja keuangan dengan kinerja non keuangan. *Balanced Scorecard* merupakan alat pengukuran kinerja yang mengintegrasikan *good corporate governance*. Konsep *Balanced Scorecard* pada awalnya dimaksudkan untuk organisasi bisnis yang berorientasi pada profit namun pada perkembangannya *Balanced Scorecard* juga dapat diterapkan pada organisasi sektor publik. Penerapan *Balanced Scorecard* pada pengukuran kinerja organisasi publik bertujuan untuk menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran internal dan eksternal. *Balanced Scorecard* dapat membantu organisasi publik dalam mengontrol keuangan dan mengukur kinerja organisasi.

Rasidi & Sadmoko, (2019) mengungkapkan bahwa *Balanced scorecard* (BSC) digunakan untuk menciptakan suatu gabungan pengukuran strategis, pengukuran finansial dan non finansial serta pengukuran ekstern dan intern pengukuran perusahaan dan dipandang menjadi empat kategori perspektif, yaitu: *Financial Perspective, Customer Perspective, Internal Business Process Perspective, serta Learning and Growth Perspective*. Keempat perspektif ini saling berhubungan dalam sebab akibat, sebagai cara untuk menerjemahkan strategi ke dalam tindakan.

1. Perspektif Keuangan (*Financial Perspective*)

Ukuran kinerja keuangan dapat memberikan indikasi apakah strategi perusahaan, dan implementasinya telah memberikan kontribusi ekonomi atau keuntungan bagi perusahaan. Untuk itu ada 3 (tiga) tema keuangan yang dapat mendorong penetapan strategi:

1. bauran dan pertumbuhan pendapatan;
2. penghematan biaya/peningkatan produktifitas; dan
3. pemanfaatan aktiva/strategi investasi.
4. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Segmen pasar merupakan sumber yang akan menjadi komponen penghasilan tujuan keuangan perusahaan, karena pusat laba terdapat di pasar bukan di perusahaan. Perspektif pelanggan memungkinkan perusahaan menselaraskan berbagai ukuran:

1. kepuasan;
2. loyalitas; dan
3. akuisisi dan profitabilitas terhadap pelanggan dan segmen pasar sasaran.
4. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Business Process Perspective*)

Pada perspektif proses bisnis internal, perusahaan dituntut melakukan identifikasi berbagai proses yang sangat penting bagi pencapaian tujuan pelanggan dan pemegang saham. Perusahaan mengembangkan tujuan dan ukuran-ukuran untuk perspektif ini setelah merumuskan tujuan dan ukuran untuk perspektif keuangan dan pelanggan. Konfigurasi proses internal bisnis didalam menciptakan rantai nilai akan masuk dalam 3 (tiga) proses bisnis utama yaitu:

1. inovasi;
2. operasi; dan
3. layanan purna jual.
4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (*Learning and Growth Perspektive*)

Tujuan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan ambisius dalam tiga perspektif lainnya dapat tercapai. Ada 3 (tiga) kategori utama untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran:

1. kapabilitas pekerja dan kapabilitas sistem informasi;
2. motivasi; dan
3. pemberdayaan dan keselarasan.

Perhitungan *Balance Scorecard* dalam penelitian ini difokuskan dengan melihat pada perspektif keuangan. Perhitungan B*alance Scorecard* pada perspektif keuangan di BPPP Tegal dilakukan dengan melakukan perhitungan nilai kinerja anggaran berdasarkan indikator capaian rincian output, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Jurnal penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Syahromi & Cheisviyanny (2023) melakukan analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Negeri Padang Tahun 2013-2014 dan Tahun 2016-2017. Analisis penelitian meliputi capaian kinerja keuangan, capaian tingkat kepuasan masyarakat dan capaian kinerja Universitas Negeri Padang berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per32/PB/2014. Dari hasil perhitungan rasio keuangan, dapat dilihat bahwa kinerja Universitas Negeri Padang setelah diterapkannya PK BLU ini semakin membaik dari tahun ketahunnya meskipun dari sisi rasionya masih belum stabil sedangkan untuk tingkat kepuasan masyarakat (mahasiswa) setelah diterapkannya PK BLU di Universitas Negeri Padang dengan menggunakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 70,02, dimana nilai tersebut masuk kedalam kategori Baik.
2. Winarso (2018)melakukan analisis kinerja keuangan terhadap laporan keuangan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (PPK-BLUD) di RSUD Idaman Banjarbaru Tahun 2013-2016. Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan capaian kinerja keuangan dan hasil yang didapat atas penilaian kinerja keuangan. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung nilai rasio keuangan yang terdiri atas rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, rasio perputaran aktiva tetap, rasio perputaran aktiva tetap, rasio ekuitas, perputaran persediaan, rasio PNBP terhadap biaya operasional, rasio biaya subsidi pasien dan nilai kinerja keuangan menurut Per- 34 / PB / 2014 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD Idaman Banjarbaru memperoleh hasil yang fluktuatif meskipun cenderung hampir sama selama tahun 2013-2016, dan nilai kinerja keuangan memperoleh kriteria Baik (A) dengan nilai 73,68%.
3. Maharani et al. (2013) melakukan analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan menggunakan teknik analisis data *Paired Sample T Test.* Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara sebelum (tahun 2006-2008) dan sesudah (tahun 2009-2011) penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,247.
4. Efrina S et al. (2019) meneliti evaluasi kinerja keuangan dan pelayanan Universitas Jambi dalam penerapan pola keuangan badan layanan umum. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan kendala yang dihadapi Universitas Jambi dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus berbasis paradigma interpretatif dengan mengaplikasikan *institutional work theory*. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan Universitas Jambi dalam penerapan pola keuangan badan layanan umum hingga saat ini dinyatakan sudah cukup baik dan telah mencapai target yang diinginkan. Kinerja pelayanan universitas jambi dalam penerapan pola keuangan badan layanan umum yang terdiri dari pelayanan akademik maupun administrasi hingga saat ini telah berada dalam posisi yang cukup baik.
5. Sulastiningsih et al. (2022) melakukan analisis kinerja keuangan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat Kejajar 1 Wonosobo (Periode 2016-2020) menggunakan rasio keuangan berdasarkan Peraturan Dirjen perbendaharaan nomor PER -36/PB/2016. Hasil penelitian menunjukkan kinerja keuangan selama tahun 2016-2020 tergolong dalam kriteria sedang dengan predikat BBB.
6. Nurliah et al. (2020) melakukan analisis kinerja keuangan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar setelah implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) selama tahun 2015-2018 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-36/PB/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: hasil analisis rasio kas, rasio lancar, dan periode penagihan piutang tergolong kurang baik, hasil analisis perputaran aset tetap (PAT), imbalan atas aktiva tetap (ROA), dan imbalan ekuitas (ROE) tergolong baik dan nilai rasio keuangan dan pendapatan BLU secara keseluruhan adalah 44,7% dengan predikat penilaian kinerja keuangan digolongkan dalam klasifikasi cukup sehat.
7. Lidyawati (2019) melakukan analisis layanan keuangan dalam penilaian kinerja keuangan badan layanan umum daerah kota Bekasi, dengan menggunakan analisa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efesiensi. Data yang dikumpulkan adalah data dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) kota Bekasi tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Badan Layanan Umum kota Bekasi tahun 2014 tergolong mandiri dengan angka rasio kemandirian sebesar 221,27% ≥100%, Rasio Efektifitas tergolong baik dan efektif diperlihatkan dengan angka rasio efektifitas sebesar 106,73% ≥ 100%, dan efisiensi dari Badan Layanan Umum Keuangan Kota Bekasi tergolong efisien diperlihatkan dengan rasio efisiensi sebesar 128,182% >100%.
8. Safitri (2022) melakukan analisis komparasi kinerja keuangan dan pelayanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang tahun 2019-2020. Penelitian tersebut membandingkan kinerja keuangan dan pelayanan Badan Layanan Publik pada era sebelum dan selama pandemi Covid- 19. Analisis data dilakukan menggunakan rasio keuangan menurut Perdirjen PB Nomor: PER-32/PB/2014 dan Maturity Rating BLU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengukuran kinerja keuangan dan pelayanan antara metode Perdirjen PB-32/2014 dan Maturity Rating BLU, serta pandemi Covid-19 belum berdampak besar terhadap kinerja badan layanan publik.
9. Rasidi & Sadmoko (2019) mendeskripsikan penerapan setiap perspektif *Balanced Scorecard* dalam pengukuran kinerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor Tahun 2010-2017. Hasil dari penelitian ini penerapan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengukuran kinerja organisasi di IPDN secara umum telah mencakup 4 (empat) perspektif yaitu *Customer & stakeholders perspective*, *Financial perspective, Internal business process perspective*, dan *Learning and Growth.*
10. Sampow & Pangkey (2022) ingin mengetahui kinerja pengelolaan keuangan dengan menggunakan metode *value for money* pada BKAD Kota Bitung tahun 2016- 2019. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan dari rasio ekonomi pada tahun 2016 berada pada 89,89% dikatakan cukup ekonomi dan dikatakan ekonomi pada tahun 2017, 2018, 2019 karena berada pada 96,23%, 93,41%, dan 94,81%. Rasio efeisiensi pada tahun 2016-2017 berada pada 91,67% dan 94,27% ini dikategorikan kurang efisiensi dan dikatakan tidak efisien pada tahun 2018-2019 karena berada pada 102,03% dan 101,88%. Rasio efektivitas tahun 2017 berada 106,83% dikatakan sangat efektif dan pada tahun 2016, 2017, dan 2019 berada pada 95,10%, 98,43%, dan 97,39% dikatakan efektif.

Hasil penelitian terdahulu di atas secara lebih jelasnya sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **TahunPenelitian** | **Judul Penelitian** | **Sample Penelitian** | **Alat Analisis** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Anggit Maharani, Wahyu Adi, Muhtar | 2013 | Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | Universitas Sebelas Maret Tahun 2006-2008 dan Tahun 2009-2011 | PairedSample T Test | Tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Arsa Nur Azhari Winarso | 2018 | Analisis KinerjaKeuangan Terhadap Laporan Keuangan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) | RSUD Idaman Banjarbaru Tahun 2013-2016 | Rasio keuangan sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. Per-34/PB/2014  | Kinerja keuangan RSUD Idaman Banjarbaru memperoleh hasil yang fluktuatif meskipun cenderung hampir sama selama tahun 2013-2016, dengan memperoleh kriteria baik (A) dengan nilai 73,68%. |
| 3 | Liona Efrina S., Enggar Diah P.A, Tona Aurora L. | 2019 | Evaluasi Kinerja Keuangan dan Pelayanan Universitas Jambi dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum | Universitas Jambi Tahun 2017-2018 | Pendekatan studi kasus dengan institutional work theory |  Kinerja Keuangan Universitas Jambi dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum hingga saat ini dinyatakan sudah cukup baik, dan telah mencapai target yang diinginkan. Kinerja Pelayanan Universitas Jambi dalam Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum terdiri dari pelayanan baik dalam akademik, maupun administrasi dan hingga saat ini telah berada dalam posisi yang cukup baik. |
| 4 | Linda Lidyawati | 2019 | Analisis Layanan Keuangan Dalam Penilaian Kinerja Keuangan  |  Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kota Bekasi Tahun 2014 | Rasio kemandirian, Rasio efektifitas, dan Rasio efesiensi | Rasio kemandirian keuangan tergolong mandiri dengan angka 221,27%, Rasio Efektifitas tergolong baik dan efektif dengan angka 106,73% , demikian juga dengan efisiensi tergolong efisien dengan angka sebesar 128,182%. |
| 5 | Rasidi dan Rudi Sadmoko | 2019 | PenerapanKonsep Balanced Score Card Dalam Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah | Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor Tahun 2010-2017 | Balanced Score Card | Penerapan konsep balanced scorecard (BSC) dalam pengukuran kinerja organisasi di IPDN, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mulai Tahun 2015 sampai 2017, secara umum telah mencakup 4 (empat) perspektif yaitu: (1) Customer & stakeholders perspective; (2) Financial perspective; (3) Internal business process perspective; dan (4) Learning and Growthperspective |
| 6 | Nurliah, Abdul Rahman Mus dan Ibrahim Dani  | 2020 | Analisis Kinerja Keuangan Pada BadanLayanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum | RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2015-2018 |  Rasio Keuangan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No: Per-36/PB/2012 | - Rasio kas, rasio lancar, dan periode penagihan piutang tergolong kurang baik,- Perputaran aset tetap (PAT), imbalan atas aktiva tetap (ROA), dan imbalan ekuitas (ROE) tergolong baik,- Nilai rasio keuangan dan pendapatan BLU secara keseluruhan masuk klasifikasi cukup sehat |
| 7 | Avianda Rahma Safitri | 2020 | Komparasi Kinerja Keuangan dan Pelayanan  | Politeknik KesehatanKemenkes Malang Tahun 2019-2020 | Rasio keuangan sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. Per-34/PB/2014 dan Maturity Rating BLU | Terdapat perbedaan pengukuran kinerja keuangan dan pelayanan antara metode Perdirjen PB-32/2014 dan Maturity Rating BLU, serta pandemi Covid-19 belum berdampak besar terhadap kinerja badan layanan publik. |
| 8 | Sulastiningsih, Agung Slamet Prasetyo dan Ema Suprihatin | 2022 | Analisis Kinerja Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) | Puskesmas Kejajar I Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020 | Rasio Keuangan sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. Per-36/PB/2016 | Kinerja keuangan Puskesmas Kejajajar 1 Kabupaten Wonosobo tergolong dalam kriteria SEDANG dengan Predikat BBB untuk tahun 2016-2020 |
| 9 | Richardo Rafael Sampow dan Royke I. J. Pangkey | 2022 | Analisis Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money | BKAD Kota Bitung Tahun 2016-2019 | Value For Money | Kinerja keuangan dari rasio ekonomi pada tahun 2016 berada pada 89,89% dikatakan cukup ekonomi dan dikatakan ekonomi pada tahun 2017, 2018, 2019 karena berada pada 96,23%, 93,41%, dan 94,81%. Rasio efeisiensi pada tahun 2016-2017 berada pada 91,67% dan 94,27% ini dikategori kan kurang efisiensi dan dikatakan tidak efisien pada tahun 2018-2019 karena berada pada 102,03% dan 101,88%. Rasio efektivitas tahun 2017 berada 106,83% dikatakan sangat efektif dan pada tahun 2016, 2017, dan 2019 berada pada 95,10%, 98,43%, dan 97,39% dikatakan efektif. |
| 10 | Muhammad Syahromi dan Charoline Cheisviyanny | 2023 | Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | Universitas Negeri Padang Tahun 2013-2014 dan Tahun 2016-2017 | Rasio keuangan sesuai Perdirjen Perbendaharaan No. Per-34/PB/2014  | Kinerja Universitas Negeri Padang setelah diterapkan-nya PK BLU ini semakin membaik dari tahun ketahunnya meski dari sisi rasionya masih belum stabil sedangkan untuk tingkat kepuasan masyarakat (mahasiswa) setelah diterapkan-nya PK BLU di Universitas Negeri Padang dengan mengguna-kan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh hasil sebesar 70,02 atau dalam kategori baik. |

1. **Kerangka Pemikiran Konseptual**

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. (Uma Sekaran dalam Sugiyono, 2006:65)

Penilaian kinerja keuangan BLU merupakan penilaian dengan pendekatan berbasis kinerja dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran rasio berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-21/PB/2015, *Value For Money* (VFM) dan *Balanced Scorecard* (BSC). Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan PER-21/PB/2015, indikator rasio keuangan yang dihitung yaitu: Rasio Kas (RK), Rasio Lancar (RL), Periode Penagihan Piutang (PPP), Perputaran Aset Tetap (PAT), Imbalan atas Aset Tetap (ROFA), Imbalan Ekuitas (ROE), dan Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (PB). Dalam konsep *Value For Money* (VFM) mendasarkan pada tiga indikator rasio keuangan yaitu: Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. Selanjutnya dalam *Balanced Scorecard* (BSC) dengan melihat perspektif keuangan, indikator yang digunakan berdasarkan perhitungan nilai kinerja anggaran yaitu: capaian rincian output, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

 Indikator-indikator tersebut akan digunakan dalam penelitian untuk mengukur nilai persentase rasio kinerja keuangan di BPPP Tegal sebelum dan sesudah menerapkan pola PK-BLU. Selanjutnya dari analisis tersebut nantinya diketahui apakah ada perbedaan kinerja keuangan yang signifikan. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis, maka model kerangka pemikiran yang menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2 Model Kerangka Pemikiran**

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2006:11), penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan, di sini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik.

 Penelitian ini akan membandingkan data kinerja keuangan BPPP Tegal sebelum dan sesudah penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Data yang diperoleh berupa angka rasio yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan prosedur statistik.

1. **Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan diteliti.

Subjek dalam penelitian ini adalah satuan kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal (BPPP Tegal). Objek penelitian berupalaporan keuangan BPPP Tegal selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yaitu tahun 2020-2021 dan selama 2 (dua) tahun setelah penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yaitu tahun 2022-2023.

1. **Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel**

Sugiyono, (2006:39) mengungkapkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Operasionalisasi variabel digunakan untuk menentukan jenis, indikator dan skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini, sehingga analisis data dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat independen yang artinya bebas atau tidak terikat oleh variabel lainnya. Variabel tersebut adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan No. PER-21/PB/2015, *Value for Money* (VFM) dan *Balanced Scorecard* (BSC) Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian kinerja keuangan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel**



1. **Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif yang diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan BPPP Tegal dan Laporan Kinerja BPPP Tegal pada tahun 2020-2021 untuk periode sebelum penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dan tahun 2022-2023 untuk periode sesudah penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

1. **Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini data yang dianalisis berasal dari hasil perhitungan rasio keuangan yang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan bantuan program SPSS *Statistic 22 for windows.* Metode analisis statistik dilakukan menggunakan Uji *Wilcoxon Signed Rank Test.*

Uji *Wilcoxon Signed Rank Test* merupakan salah satu jenis uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua sampel yang berhubungan atau berpasangan. Uji ini sering digunakan sebagai alternatif dari uji t berpasangan (*paired t-test*) ketika asumsi normalitas data tidak terpenuhi. Uji *Wilcoxon* didasarkan pada peringkat (*ranks*) daripada nilai data mentah, sehingga tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Uji ini mengevaluasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam median antara dua kondisi atau waktu yang berbeda untuk kelompok yang sama. (Ghozali, 2015)

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan BPPP Tegal selama periode sebelum dan sesudah penerapan pola PK-BLU dengan menggunakan nilai rasio keuangan.

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai signifikansi (sig) > 0,05, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola PK-BLU di BPPP Tegal, begitu juga sebaliknya apabila nilai signifikansi (sig) ≤ 0,05, maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan pola PK-BLU di BPPP Tegal.